

PENGAWASAN TERHADAP PRODUK PERATURAN DAERAH DALAM SUATU LEMBAGA DI INDONESIA

Muhammad Aditya Saputera Fahdiani¹, Sudiyono², Maksum³

¹Ilmu hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIM17810655

²Ilmu hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN0618041081

³Ilmu hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)

Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN061605914

E-mail: aditaditya7791@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan daerah merupakan peraturan yang menduduki hierarki paling rendah dalam banyak serta memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit sebab diharuskan untuk sejalan dengan peraturan perundang undangan dengan kedudukan di atasnya. dalam ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang undangan, namun peraturan daerah memiliki muatan materi yang memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Studi ini ingin mengetahui bagaimana pengawasan terhadap produk peraturan daerah di Indonesia. persoalan tersebut dirinci lebih lanjut melalui sejumlah subtopik, seperti : 1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap produk peraturan daerah. 2. Bagaimana pengawasan terhadap produk peraturan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 3. Apa saja muatan materi dalam peraturan daerah. 4. Bagaimana masalah-masalah dalam produk peraturan daerah terjadi.

Kata Kunci : *Produk Peraturan Daerah*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gunawan, Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legeslatif visimedia,

Hadjon, Philipus M. (1992) Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945 suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Huda Ni'matul, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Indrayana, Denny, Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.

Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persadam 2013.

JURNAL

Huda, N. (2006). Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hirerarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 13 .

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembatalan Perundangundangan.

Marzuki, Peter Mahmud , Penelitian Hukum,Jakarta